

SKRIPSI

**Kewenangan Legalitas Pengelolaan Kawasan Hutan
Perhutani dengan Program Perhutanan Sosial melalui
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan P.39**



Oleh :

ASRUL AZIS

20161440067

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

2020

**Kewenangan Legalitas Pengelolaan Kawasan Hutan
Perhutani dengan Program Perhutanan Sosial melalui
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan P.39**

SKRIPSI

“Skripsi Ini Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh
Derajat Sarjana Strata Satu Pada Fakultas Hukum
Di Universitas Muhammadiyah Surabaya ”



Oleh:

ASRUL AZIS

NIM : 20161440067

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

2020

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Kewenangan Legalitas Pengelolaan Kawasan Hutan Perhutani dengan Program Perhutanan Sosial melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan P.39.

Nama Mahasiswa : ASRUL AZIS

NIM : 20161440067

Telah diterima dan disetujui untuk dipertahankan pada ujian skripsi yang diselenggarakan oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya pada tanggal 19 Juli 2020

Surabaya, 19 Juli 2020

Menyetujui:

Dosen Pembimbing



Satria Unggul WP, S.H.,M.H.

Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surabaya



Dr. Asri Wijayanti, S.H.,M.H.

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : Kewenangan Legalitas Pengelolaan Kawasan Hutan Perhutani dengan Program Perhutanan Sosial melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Nama Mahasiswa : ASRUL AZIS

NIM : 20161440067

Telah dipertahankan dihadapan Dewan Penguji pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya pada tanggal Juli 2020

Surabaya, 19 Juli 2020.

Dewan Penguji:

Ketua 1. Levina Yustitianoingtyas, S.H., LL.M. ()

Anggota : . Satria Unggul W.P, S.H., M.H. ()

Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surabaya

 

Dr. Asri Wijayanti, S.H.,M.H.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : ASRUL AZIS

NIM : 20161440067

Judul Skripsi : Kewenangan Legalitas Pengelolaan Kawasan Hutan Perhutani dengan Program Perhutanan Sosial melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan P.39.

Dengan ini menyatakan bahwa penulisan Skripsi ini dengan judul Kewenangan Legalitas Pengelolaan Kawasan Hutan Perhutani dengan Program Perhutanan Sosial melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan P.39 berdasarkan hasil penelitian, pemikiran, dan pemaparan asli dari diri saya sendiri. Jika terdapat karya orang lain, saya telah mencantumkan sumber yang asli.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan, maka saya bersedia bertanggung jawab secara akademik atau sanksi lain sesuai peraturan yang berlaku.

Surabaya, 19 Juli 2020

Yang membuat pernyataan



NIM: 20161440067

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat, Hidayah, dan Inayah-Nya sehingga kami dapat merampungkan penyusunan Usulan Penelitian Skripsi “Kewenangan Legalitas Pengelolaan Kawasan Hutan Perhutani dengan Program Perhutanan Sosial melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan P.39” tepat pada waktunya.

Penyusunan skripsi semaksimal mungkin saya upayakan dan didukung bantuan berbagai pihak, sehingga dapat memperlancar dalam penyusunannya. Untuk itu tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. dr. Sukadiono, M.M. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya.
2. Ibu Dr. Asri Wijayanti, S.H. M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya.
3. Satria Unggul WP, S.H.,MH. selaku dosen pembimbing atas segala perhatian, pengertian, ketekunan, dan kesabarannya dalam memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis sehingga penulisan skripsi ini bisa selesai dengan baik.
4. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya atas segala ilmunya yang telah diberikan kepada penulis mulai sejak masuk kuliah sampai saat ini.
5. Seluruh karyawan tata usaha Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya yang telah membantu dan melayani keperluan mahasiswa dengan sebaik-baiknya.
6. Ibu Suriani dan Bapak Abdul Azis selaku kedua orang tua kandung saya, Arjun, Arman, serta keluarga yang telah memberikan segalanya baik secara moril maupun materiil maupun kasih sayang sehingga kami dapat menyelesaikan skripsi ini.

7. Intan Amalia selaku istri, seseorang yang begitu spesial, yang telah memberikan semangat terus-menerus mendorong dan memotivasi untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.
8. Ibu Soelistyowati selaku mertua yang tak henti-hentinya mendoakan dan mensupport saya sehingga dapat berhasil sampai saat ini.
9. Teman-teman Ikatan Alumni Sekolah Kehutanan Menengah Atas (SKMA) khususnya letting Jenrison, Irfan, Iffan, Wahyu dan Riski dimana selama proses kuliah selalu membantu baik dari segi ilmu maupun informasi sehingga bias lulus bersama.
10. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya angkatan 2016 kelas Karyawan yang selalu saling support hingga masa akhir studi tetap bersama-sama menjalin kekeluargaan dengan baik dikelas maupun diluar kelas.

Namun tidak lepas dari semua itu, saya menyadari sepenuhnya bahwa masih terdapat kekurangan baik dari segi penyusunan bahasa dan aspek lainnya. Oleh karena itu, dengan lapang dada saya membuka selebar-lebarnya pintu bagi para pembaca yang ingin memberi saran maupun kritik demi memperbaiki Skripsi ini.

Akhirnya penyusun sangat mengharapkan semoga dari Proposal Skripsi ini dapat diambil manfaatnya dan besar keinginan saya dapat menginspirasi para pembaca untuk mengangkat permasalahan lain yang relevan.

Surabaya, 19 Juli 2020

Penulis

DAFTAR PUSTAKA

http://ppid.menlhk.go.id/siaran_pers/browse/2435

<http://geoportal.menlhk.go.id>

http://webgis.menlhk.go.id:8080/nfms_simontana/

<https://foresteract.com/deforestasi/>

<https://perhutani.co.id/tentang-kami/profil-perusahaan-perum-perhutani/>

A. Gunawan Setiardja, *Dialektika Hukum dan Moral dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia*, Kanisius, Jogjakarta, 1990, hlm. 52.

Adji, Oemar Seno, *Peradilan Bebas Negara Hukum*, Jakarta: Erlangga, 1980.

Ateng Syafrudin, “Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab”, *Jurnal Pro Justisia Edisi IV*, Universitas Parahyangan, Bandung, 2000, hlm.22.

Indrohato, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik*, dalam Paulus Efendie Lotulung, *Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, hlm. 65.

J.G. Brouwer dan Schilder, *A Survey of Dutch Administrative Law*, Ars Aequilibrari, Nijmegen, 1998, hlm. 16-17.

- Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1998, hlm. 35-36.
- Moeljatno, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2001.
- Muhammad Yasin, 2017, makna asas legalitas dalam hukum administrasi negara, <https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl6989/makna-asas-legalitas-dalam-hukum-administrasi-negara/> (diakses tanggal 25 Oktober 2019)
- Murjani, N, 2011, Perjanjian Cancun dan REDD+ di Indonesia, <http://blog.cifor.org/1311/>
- Murjani, N, 2011, Perjanjian Cancun dan REDD+ di Indonesia, <http://blog.cifor.org/1311/>.
- Philipus M Hadjo n, Pega nta r Hukum Admninistra si Indonesia , (Yo g y akarta: Gajah Mada University Press, 2008), h. 177-178.
- Purnomo, Bambang, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994.
- Puspitojati, Triyono, 2013, Kajian 9uKebijakan Pengembangan Pangan di Areal Hutan Tanamana untuk Mendukung Swasembada Pangan, Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol. 10 No. 2, Agustus 2013.
- Rahmawaty. 2004. Hutan : Fungsi dan Peranannya Bagi Masyarakat. USU Digital Library
- Reksohadiprodjo, s., Brodjonegoro. 2000. Ekonomi Lingkungan. BPFE Yogyakarta. Edisi Kedua. Yogyakarta.
- Rusadi Kantaprawira, "Hukum dan Kekuasaan", Makalah, Universitas Islam Indonesia, Jogjakarta, 1998, hlm. 37-38.

- Stout HD, de Betekenissen van de wet, dalam Irfan Fachruddin, Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah, Alumni, Bandung, 2004, hlm.4.
- Susilowati. 2015. Konflik Tenurial dan Sengketa Tanah Kawasan Hutan yang Dikelola Oleh Perum Perhutani.. Jural Repertorium
- Suwoto Mulyosudarmo, Kekuasaan dan Tanggung Jawab Presiden Republik Indonesia, Suatu Penelitian Segi-Segi Teoritik dan Yuridis Pertanggungjawaban Kekuasaan, Universitas Airlangga, Jakarta, 1990, hlm. 30.
- Syahadat, Epi dan Hariyatno Dwiprabowo, 2013, Kajian PaduSerasi Tata ruang daerah (TRD) dengan tata guna hutan, Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol. 10 No. 2, Agustus 2013.
- Theo Huijbers OSC, "Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah", (Yogyakarta:Kanisius, 1982), hal. 119.
- Tubagus Ronny Rahman Nitibaskara, Paradoksal Konflik dan Otonomi Daerah, Sketsa Bayang-Bayang Konflik dalam Prospek Masa Depan Otonomi Daerah, Sinar Mulia, Jakarta, 2002, hlm.65.
- Utrecht, Ernest, Hukum Pidana I, Bandung: Universitas, 1960.
- Yunsri Munaf, Hukum Administrasi Negara, Marpoyan Tujuh Publishing, Pekanbaru-Riau, 2015, hlm 54.
- Zain, AS. 1996. Hukum lingkungan Konservasi Hutan. Penerbit Rineka Cipta. Jakarta.